PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

UNIT KERJA : **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **RINALDI**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **185776**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 1.315.000.000

1. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA NATUNA, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 257 m2/138 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS, HASIL SENDIRI Rp. 925.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
5. Tanah Seluas 88 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 199.500.000

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, YAMAHA YAMAHA AEROX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000
4. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
5. MOTOR, KAWASAKI NINJA RR 150 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA — Rp. 56.000.000

D.	SURAT BERHARGA	Rp.	----
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	205.957.525
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	----
	Sub Total	Rp.	1.776.457.525
III.	HUTANG	Rp.	247.762.220
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.528.695.305

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.